



Negeri Subur Pengimpor Hasil Pertanian

O RANG bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman'. Begitulah sepenggal lirik lagu legendaris Group Bimbo yang sangat terkenal tahun 1970-1980-an. Melalui lirik lagu tersebut sang legendaris menggambarkan begitu suburnya Tanah Air tercinta ini. Ada juga yang menggambarkan kesuburan dan keelokan alam Indonesia, laksana bentangan permadani atau zamrudnya khatulistiwa.

Benarkah negeri ini subur *bak* yang disebut dalam lirik lagu tersebut? Sepertinya hal itu tak bisa dibantah. Tapi apakah kesuburannya telah memberi manfaat dan mampu memenuhi kebutuhan penduduk Indonesia akan hasil-hasil pertanian? Seperti bahan-bahan pokok kebutuhan harian untuk kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri.

Inilah persoalannya! Meskipun negeri kita dikenal sebagai negara agraris dengan tanah subur, air hujan yang cukup, musim yang hanya dua, lautan yang luas dan berbagai kelebihan lainnya, tapi ternyata 10 bahan pokok yang merupakan hasil pertanian, laut dan peternakan semuanya justru mengimpor. Yakni; beras, jagung, kedelai, biji gandum, tepung terigu, gula pasir, daging sapi/ayam, garang singkong dan kentang. Saat ini menyusul lagi cabai yang diimpor.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Bachrul Chairi menyatakan untuk meredam kenaikan harga cabai, pemerintah akan membuka keran impor cabai mulai Juli 2013. Alokasi impor cabai rawit untuk semester II 2013 adalah 10.000 ton. Impor sebesar itu, kata Bachrul, sesuai dengan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) yang dikeluarkan Kementerian Pertanian. Pertimbangannya, pemerintah melihat minimnya panen cabai hingga penghujung tahun 2013.

Saat Menteri Perdagangan Gita Wirjawan memantau harga pangan di Pasar Tebet Barat, Jakarta, harga cabai melonjak tinggi. Kenaikan harga mencapai 42,86 persen dari Rp 35 ribu ke Rp 50 ribu per kilogram.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sepanjang tahun 2012, impor beras mencapai 1,8 juta ton dengan nilai US\$ 945,6 juta. Negara terbesar yang memasok beras ke Tanah Air adalah Vietnam dengan total 1,1 juta ton senilai US\$ 564,9 juta. Selain itu, Thailand yang telah mengimpor 315,4 ribu ton dengan nilai US\$ 186,2 juta sepanjang tahun 2012.

Sedangkan impor jagung pada tahun 2012, mencapai 1,7 juta ton dengan nilai US\$ 501,9 juta. Negara asal jagung impor terbesar adalah India dengan total impor 1,1 juta ton dengan nilai US\$ 319 juta sepanjang tahun lalu. Kemudian Argentina, dengan total impor jagung ke Indonesia sebesar 286,3 ribu ton dengan nilai US\$ 89 juta.

Komponen Cadangan untuk Pertahanan Indonesia

OLEH: IWAN SULISTYO

PENGAMAT HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pemerintah dan Komisi I DPR-RI akan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komponen Cadangan Pertahanan Negara (KCPN atau Komcad). Wacana menjadikan pasal Komcad "naik kelas" menjadi suatu UU tersendiri bukanlah hal baru dan mengejutkan. Sebab, sejak UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara disahkan, pada saat yang sama Komcad (dan Komponen Pendukung) juga harus disiapkan (lihat Pasal 7 dan 8).

Pemerintah berhadapan dengan kondisi dilematis. Tidak menyiapkan Komcad berarti tidak menjalankan amanat UU Pertahanan; dan itu adalah pelanggaran serius. Kecuali karena muncul penolakan yang keras dari masyarakat atau alasan politis lain, pemerintah akhirnya memang berpikir untuk merevisi atau mewujudkannya dengan cara yang "agak fleksibel" bagi kepentingan nasional.

Mengingat UU Komcad adalah amanat UU Pertahanan, saya berpandangan, ia penting dan mendesak dalam sistem pertahanan semesta yang kita anut. Namun, bu-

tetap dititik-beratkan pada kekuatan maritim, dengan tidak abai akan matra udara dan darat.

Dalam menyusun kebijakan pertahanannya (mulai dari sistem, strategi, postur, hingga menghitung anggaran), setiap negara akan selalu merumuskan ancaman yang ia hadapi atas dasar analisis terhadap dinamika lingkungan strategis. Buku Putih Pertahanan Indonesia, baik yang terbitan 2003 maupun 2008, menyebutkan secara eksplisit bahwa, ke depan, ancaman tradisional (invasi atau agresi militer dari negara luar) kemungkinannya kecil. Namun, bukan berarti Indonesia abai akan kesiapsiagaannya.

Nah, jika pemerintah memahami dan menyadari esensi dari persepsi/perkiraan ini, tentunya RUU Komcad, khususnya "keharusan untuk mobilisasi SDM", masih dapat dikesampingkan.

Lazimnya, negara yang *survive* secara jangka panjang ialah negara yang tangguh dan piawai dalam mengawaki pelbagai diplomasi serta mengelola sumberdaya pertahanannya secara paripurna. Mengisi "soft power" dan "smart power" dengan sumber-



tetapi, saya rasa, sebagian masyarakat kita masih belum matang dalam menggelar demokrasi prosedural; utamanya di tingkat provinsi dan lokal.

Tidak ada jaminan, di dalam "masa damai" (bukan dalam kondisi latihan dasar kemiliteran dan mobilisasi untuk perang), sipil yang telah terlatih akan cukup kuat untuk menjaga stabilitas dan dinamika di lapangan. Tak mampu menahan diri, jang-jangan gesekan kecil dalam interaksi sosial keseharian justru dapat menjadi pemicu konflik bernasib, antara

nyangga komponen utama, mereka dapat berkiprah dalam "perang otak", "perang ilmu pengetahuan", "perang keunggulan teknologi", dan "perang daya cipta dan inovasi produk militer".

Konversi "sumberdaya manusia yang unggul" ini ke semua industri strategis pertahanan (PT Pindad, PT PAL, PT DI, dll.) adalah langkah yang sangat produktif. Di sini akan jelas terlihat betapa pertahanan militer dan nirmiliter saling berpadu dan tak terpisahkan. Bukankah itu juga bagian dari apa yang disebut sebagai

sasi yang harus diterima warga negara dari pemerintah. Ketika, misalnya, prajurit TNI dibatasi hak politiknya (tidak memilih dan dipilih) dan bahkan memiliki risiko tinggi saat keputusan politik negara dijalankan, mereka layak memperoleh kompensasi yang cukup, termasuk bagi keluarga mereka.

Kalau jumlah personel militer dirasa masih kurang atau belum kuat, proses rekrutmen hingga mencapai rasio yang ideal tentu harus ditempuh dengan tetap mencukupi kesejahteraan mereka. Dan itu berarti status baru

US\$ 319 juta sepanjang tahun lalu. Kemudian Argentina, dengan total impor jagung ke Indonesia sebesar 286,3 ribu ton dengan nilai US\$ 89 juta.

Untuk impor kedelai sepanjang tahun 2012 mencapai 1,9 juta ton dengan nilai US\$ 1,2 miliar. Negara asal kedelai impor terbesar datang dari Amerika Serikat dengan jumlah impor mencapai 1,8 juta ton dengan nilai mencapai US\$ 1,1 miliar. Impor gula pasir, pada tahun 2012, mencapai 91,1 ribu ton dengan nilai US\$ 62 juta. Negara asal gula pasir impor terbesar adalah Thailand dengan total impor 60,7 juta ton dengan nilai US\$ 39,1 juta sepanjang tahun lalu. Kemudian Australia, dengan total impor gula pasir ke Indonesia sebanyak 9,3 ribu ton dengan nilai US\$ 8 juta.

Untuk garam, sepanjang tahun 2012, RI telah mengimpor garam sebanyak 2,2 juta ton dengan nilai yang mencapai US\$ 108 juta. Negara pemasok garam utama adalah Australia dengan berat garam impor sebanyak 1,6 juta ton dengan nilai US\$ 80,9 juta. Yang lebih aneh lagi, Indonesia juga mengimpor singkong. Sepanjang tahun 2012, impor singkong tercatat 13,3 ribu ton atau senilai US\$ 3,4 juta. Hanya tiga negara yang mengimpornya ke Indonesia, yakni Thailand, Cina dan Vietnam.

Pada tahun 2012 lalu Indonesia juga mengimpor kentang sebesar 54,1 ribu ton dengan nilai US\$ 36,4 juta. Negara Australia merupakan pemasok kentang terbesar dengan jumlah impor sebanyak 13,3 ribu ton dengan nilai US\$ 9,9 juta.

Realitas itu jelas membuat kita terenyuh. Silakan saja Indonesia mengimpor mobil, sepeda motor, handphone, televise, lap top dan lainnya. Tapi semestinya tidak demikian halnya dengan produk-produk pertanian yang notabene, komoditas tersebut sangat cocok dengan iklim dan tanah di Indonesia. Tapi begitulah kenyataan.

Sudah semestinyalah persoalan ini menjadi perhatian yang sangat serius dari pemerintah. Mesti ditemukan apa benang merahnya atas persoalan ini. Apakah persoalan bibit, pupuk, pestisida, hama atau yang lainnya yang menjadi penyebab anjloknya kuantitas dan kualitas produk pertanian. Jika Indonesia ke depan bisa membenahi dan meningkatkan hasil pertanian untuk 10 kebutuhan pokok tersebut, dampaknya sangatlah besar. Perekonomian masyarakat akan lebih hidup. Semoga!

penting dan mendesak dalam sistem pertahanan semesta yang kita anut. Namun, bukan dalam aspek mobilisasi Sumber Daya Manusia (SDM)-nya, tetapi lebih kepada bagaimana menyiapkan dan merumuskan bentuk atau pengerahan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional (lihat Pasal 6 RUU Komcad).

Dengan kata lain, upaya mempertanggung pertahanan Indonesia, untuk saat sekarang, harus tetap fokus pada komponen utama, yakni Tentara Nasional Indonesia (TNI), melalui pemutakhiran teknologi alutsista (alat utama sistem persenjataan). Agar *deterrent effect* dapat bekerja dengan signifikan dan kredibel, Indonesia diharapkan sanggup mengimbangi postur (kekuatan dan kemampuan) pertahanan sejumlah "negara kunci" di Asia Tenggara (Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina). Bila *Minimum Essential Forces* (MEF) belum terjangkau, pemerintah harus mengupayakan pembelian alutsista yang teknologinya setara dengan empat negara tetangga itu. (Artikel saya terkait persoalan pertahanan Indonesia dalam konteks *Dilema Keamanan dan Perimbangan Kekuatan di Asia Tenggara* pernah dimuat dalam *Haluan*, 22/3/2012).

Sebagai negara kepulauan, arah pertahanan (penganggaran dan pembelian alutsista) hingga 2024 selayaknya

hanannya secara puripurna. Mengisi "soft power" dan "smart power" dengan sumberdaya pertahanan yang cemerlang tentu tak kalah pentingnya dengan menyokong "hard power".

Persoalan Utama

Masih menyimpan ragam persoalan, diskusi tentang RUU Komcad tentu bisa meluas dan dapat diteropong dari pelbagai perspektif. Saya melihat, setidaknya ada dua masalah besar. *Pertama*, soal status "sipil" dan "kombatan" seseorang. Mewajibkan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pekerja dan/atau buruh serta masyarakat sipil lainnya untuk mobilisasi guna mendukung TNI di dalam pertahanan niscaya memunculkan dampak serius dan bahkan berbahaya (cermati Pasal 8, 29, dan 30 RUU Komcad).

Bagi para mantan prajurit TNI, tentu relatif tak ada masalah. Bagaimana jika PNS, buruh/pekerja, dan masyarakat sipil yang sudah terlatih untuk mengangkat senjata diam-diam aktif terlibat politik praktis? Mereka, misalnya, kecewa dengan hasil perolehan suara dan ternyata berkonflik dengan pendukung pasangan lain? Bukankah cukup berisiko bila para buruh menggelar aksi unjuk rasa dan berhadapan dengan aparat kepolisian?

Sebagai manusia, tidak ada jaminan emosi mereka dapat dikendalikan, apalagi jika dikaitkan dengan kultur. Walau sudah agak cerdas;

hingga gesekan kecil dalam interaksi sosial keseharian justru dapat menjadi pemicu konflik bersenjata antar-individu atau antarkelompok.

Cukup sulit mengawasi implementasi di lapangan ketika anggota Komcad yang kembali ke statusnya semula (menjadi warga sipil) untuk melepaskan "status kombatan"-nya. Jadi, persoalannya bukanlah perhitungan ideal dan seberapa besar dana yang hendak dianggarkan dari Produk Domestik Bruto (PDB) bagi Komcad, tapi lebih kepada implikasi sosial-politik dalam jangka waktu tertentu yang akan dipikul.

Bila pembentukan SDM Komcad dipandang mendesak, pemerintah bisa memulainya dengan merumuskan tahapan awal. Gagasan mengintegrasikan semua anggota resimen mahasiswa (menwa) secara langsung ke dalam komponen cadangan, misalnya, mungkin adalah suatu yang efisien, masuk akal, dan tepat sasaran.

Atau, bisa juga integrasi dari kalangan masyarakat sipil yang ketika mahasiswa pernah digembleng sebagai menwa di kampus. Sementara, generasi muda cemerlang yang pernah menang di gelanggang olimpiade internasional (ilmu eksakta), tidak mesti ikut serta dalam latihan fisik kemiliteran dan "angkat senjata". Sebaliknya, mereka justru dapat berkontribusi dengan cara yang lain untuk pertahanan kita. Sebagai pe-

rinter dan nirmiliter saling berpadu dan tak terpisahkan. Bukankah itu juga bagian dari apa yang disebut sebagai "pertahanan semesta"; suatu pertahanan dalam arti yang sangat luas?

Maka, anggota Komcad dari unsur SDM sejatinya tetap pada "fungsi alamiah dan nirmiliter"-nya, yakni mendukung, mempertahankan, dan memenangkan "perang keunggulan antarbangsa" serta memperkuat nilai-nilai luhur dan kekayaan budaya.

Kedua, soal sanksi pidana bagi SDM yang sengaja tidak mematuhi panggilan menjadi bagian dari Komcad tanpa alasan yang sah dan/atau tipu muslihat sehingga ia tidak ikut (cermati Pasal 38-42). Menyimak lemah dan runyamnya penegakan hukum akhir-akhir ini, cukup rumit jika pemerintah memberi sanksi pidana penjara bagi warganya. Dari rangkaian pasal terkait pidana ini, mungkin kita masih harus merenung dan mengkaji secara jernih. Saya lebih melihat sanksi pidana bagi yang tidak mengerahkan sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional bagi kepentingan pertahanan sebagai ketentuan yang lebih tepat dan relevan karena terkait erat dengan dimensi "ekonomi-politik".

Jika sanksi ini didasarkan pada pemikiran bahwa "membela negara oleh warga adalah suatu kewajiban", maka kita juga harus *fair* dalam melihat persoalan hak dan kompen-

asio yang ideal tentu harus ditempuh dengan tetap mencukupi kesejahteraan mereka. Dengan begitu, status kombatan dan pelbagai sanksi yang mengikatnya jelas. Alhasil, di sini konsep "kepentingan negara" dan "kepentingan pemerintah" menjadi krusial.

Semangat reformasi yang menggebu-gebu sejak 1998 hingga kini telah mendorong segenap elemen bangsa untuk menata-ulang pelbagai aspek kehidupan, termasuk di sektor keamanan (*security sector reform*). Karena itu, UU Pertahanan dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI berisi semangat itu; dimana militer tidak berbisnis dan tidak lagi ikut dalam politik praktis. Mereka hanya boleh tunduk pada keputusan politik negara. Intinya, pembenahan sistem dan pelbagai institusi di sektor keamanan di arahkan kepada "tatanan yang ideal" untuk mendukung nilai-nilai demokrasi, supremasi sipil, dan hak asasi manusia.

Pada akhirnya, perang dan damai adalah dua kondisi yang memang dekat dengan kita. Tetapi, tampaknya, karena "perang terlalu penting jika hanya diserahkan kepada para jenderal saja" dan "damai terlalu rumit untuk jadi urusan para politisi sipil saja", maka "semesta" berperan dalam mengawal jalan panjang *security sector reform* di Indonesia. Jangan sampai UU Komcad nantinya dianggap sebagai "produk yang terburu-buru". (*)

Haluanisme

Aliran Listrik Ribuan Pelanggan PLN Terancam Diputus

- Sering padam mau diputus lagi...
- Penerima BLSM Akan Didata Ulang
- Lebih cepat lebih baik...



Insiden Siraman Teh untuk Thamrin